

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Karunia, L., & Maburur, A. (2023). Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah. Selemba Empat.
- Mahsun, S., Firma, S., & Heribertus, H. (2011). Akuntansi sektor publik. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi sektor publik-edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Moleong J.Lexy. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Swasono, S. E., & Arief, S. (2010). Ekspose ekonomika: mewaspadaikan globalisasi dan pasar-bebas. Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM.

Sumber Jurnal :

- Alhusain, A. S. (2016). Analisa Potensi Sektor Usaha Strategis Daerah Sebagai Pertimbangan Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1), 149-163.
- Elda, N., Sulisty, S., & Dianawati, E. (2020). Pengaruh Pengawasan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 8(1).
- Esmi Warassih., (2007). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Mensejahterakan Rakyat.
- Galoga, L. dkk (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
- Gorahe, I., Masinambow, V., & Engka, D. (2014). Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di provinsi sulawesi utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14(3).

- Hartawan, R. C., & Kosasih, F. (2023). Implementation of the van meter and van horn zoning system policies model. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 2(4).
- Hehamahua, H. (2014). ANALISIS APBD KOTA SURABAYA Suatu Kajian Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah. *Media Trend*, 9(1).
- Iqbal, M. dkk (2021). Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah
- Izzabillah, N. (2024). IMPLEMENTASI PENYUSUNAN ANGGARAN KAS TERHADAP PENGELOLAAN APBD PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN BONDOWOSO. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 282-292.
- Jalil, M. (2012). DEMOKRATISASI OTONOMI DAERAH SEBAGAI WUJUD REFORMASI BUDAYA. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 169-186.
- Mauludin, R. (2017). Pengaruh Atraksi Wisata Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan Ke Daya Tarik Wisata Waduk Darma Kabupaten Kuningan. *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*, 14(2), 57-68.
- Nasser, A. P., Bahri, S., & Juharni, J. (2024). Implementasi Kebijakan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Enrekang. *Paradigma Journal of Administration*, 2(1), 41-46.
- Nuraeni, A. S. I. (2017). Implementasi kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis*, 5(11), 55-64.
- Oktavina, D. (2012). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 89-101.
- Pilat, J. J. dkk (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015
- Precelina, D. D., & Wuryani, E. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten jombang. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(3).
- Priambodo, A. (2014). Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 3(4).

- Putri, S. G. (2022). IMPLEMENTASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PADA MASA COVID-19 DI KABUPATEN BATANG HARI (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Sasana, H. (2011). Analisis determinan belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
- Setiawan, I. K. A., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2021). Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Ulang. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 78-82.
- Sianturi, T. U., & Hwihanus, H. (2024). Analisis Kejelasan Anggaran, Efektivitas Kinerja Anggaran & Pengawasan Keuangan Dalam Pelaksanaan Apbd Tahun 2022 Kota Blitar. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 79-91.
- Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 146-157.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- Triyono, N., Kalangi, L., & Alexander, S. (2019). Evaluasi Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). A Model of the Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Yuliasati, Y. (2017). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Katalogis*, 4(12).

Sumber Internet :

- Ciremaityday. (2022). Sempat Defisit Nyaris Rp 500 Miliar, APBD Kuningan 2023 Resmi Disahkan. *Kumparan*. Diakses dari <https://kumparan.com/ciremaityday/sempat-defisit-nyaris-rp-500-miliar-apbd-kuningan-2023-resmi-disahkan-1zM2uh1Xe6D>.
- Ciremaityday. (2022, 30 November). RAPBD Kuningan tahun 2023 mengalami penurunan, defisit hampir Rp 500 miliar. *Kumparan*. <https://m.kumparan.com/ciremaityday/rapbd-kuningan-tahun-2023-alami-penurunan-defisit-nyaris-rp-500-miliar-1zKwFcyAnM5/full>.

Hukumonline. (2023, Juni 5). Sektor PBJ Jadi Area Rawan Korupsi Tingkat Daerah. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/sektor-pbj-jadi-area-rawan-korupsi-tingkat-daerah-lt65c316a82a55b/?utm_source

Indramayujeh. (2023, 3 Agustus). Perubahan APBD Kuningan 2023 Defisit Rp259 Miliar Lebih, Berpotensi Gagal Bayar?. IndramayuJeh. <https://www.indramayujeh.com/berita-terbaru/perubahan-apbd-kuningan-2023-defisit-rp259-miliar-lebih-berpotensi-gagal-bayar/>.

Kertya Witaradya. (2010, April 13). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process. Kertya Witaradya. <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>

Kuningan Mass. (2024, 29 Agustus). Sudah Mau Pilkada, Defisit Anggaran Bakal Jadi PR Serius.. <https://kuninganmass.com/sudah-mau-pilkada-defisit-anggaran-bakal-jadi-pr-serius>.

Arsip Negara :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. (2015). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Arsip Daerah :

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun anggaran 2023.